

Abstrak
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Program
di SMA Kabupaten Sleman

Oleh:
Sudiyono dan Nurtanio Agus P*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemberdayaan: 1) komite sekolah dalam penyusunan program; 2) pengusaha/dunia usaha dalam penyusunan program; 3) tokoh agama dalam penyusunan program 4) tokoh seni dan budaya dalam penyusunan program 5) pemerintah daerah dalam penyusunan program 6) pemerintah kecamatan dalam penyusunan program di SMA kabupaten Sleman 7) Proses pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program SMA di kabupaten Sleman

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, yang jumlahnya ada 48 SMA di kabupaten Sleman. Respondennya kepala sekolah SMA. Metode penelitian dengan menggunakan angket dan wawancara. Teknik analisis dengan menggunakan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemberdayaan dalam penyusunan program: 1) komite sekolah di SMA kabupaten Sleman pada tingkatan "tidak ada" pemberdayaan 0,4%, sangat rendah 2%, rendah 62% dan tinggi 34%; 2) pengusaha/dunia usaha di SMA kabupaten Sleman pada tingkatan rendah 92%, dan moderat 8%. 3) tokoh agama di SMA kabupaten Sleman dalam tingkatan rendah 21%, moderat 52%, dan tinggi 27%. 4) seniman dan budayawan di SMA kabupaten Sleman dalam tingkatan rendah 77%, dan moderat 23%.. 5) pemerintah daerah di SMA pada tingkatan "sangat rendah" 16,9%, "rendah" 50%, "moderat" 32% dan "tinggi" 1,1%. 6) pemerintah kecamatan di SMA pada tingkatan rendah 94%, dan moderat 6%.. 7) Proses pemberdayaan masyarakat di SMA kabupaten Sleman dilakukan dengan dua pola, yaitu: a) kepala sekolah membentuk sebuah tim penyusun program. Tim ini bertugas mengumpulkan dan menerima masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Masukan itu didiskusikan dengan kepala sekolah. Namun pemangku kepentingan dan masyarakat juga memberikan masukan secara informal kepada pembuat keputusan dan b) kepala sekolah membentuk sebuah tim penyusun program. Setelah tim ini memperoleh masukan secara informal dari masyarakat umum kemudian melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan yang juga telah memperoleh masukan secara informal dari masyarakat. Hasil kesepakatan kedua belah pihak melalui dialog tersebut kemudian oleh tim didiskusikan dengan pembuat keputusan yang juga sudah memperoleh masukan secara informal dan dialogis dari masyarakat. Melalui forum ini program diputuskan berdasarkan skala prioritas. 8) Temuan penelitian ini adalah a) dalam penyusunan visi dan misi ternyata baru ada 12% SMA yang memberdayakan pemerintah daerah dan hanya dilakukan oleh SMA Negeri sedangkan pemangku kepentingan yang lain (pengusaha, tokoh agama, seniman budayawan, komite sekolah, pemerintahan kecamatan) tidak diberdayakan; b) Proses penyusunan program menunjukkan belum adanya kesetaraan dan kebersamaan; c) secara umum, komite sekolah sebagai representasi masyarakat belum diberdayakan secara optimal; d) tingkat pemberdayaan yang masih pada tingkatan "rendah dan moderat" sebagaimana dilakukan oleh sekolah dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat.

*) Dosen AP FIP UNY

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Paradigma sosiologis menganggap bahwa sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah ada karena ada masyarakat. Baiknya buruknya sekolah tergantung dari masyarakat, bahkan sekolah menjadi cermin masyarakat. Jika masyarakatnya sakit maka lembaga sekolahnya juga sakit.

Melalui berbagai kajian dan pengamatan yang terjadi di masa dulu sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat daya internal yang mekanismenya bersifat khas (*local specific*) dan secara nyata berperan dalam mengatasi masalah sendiri sering disebut dengan sumberdaya lokal, energi sosial kreatif, yang pada dasarnya menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat energi sosial yang diarahkan untuk mengatasi masalah sosial baik terbatas pada mengatasi konsekuensinya maupun penyebabnya.

Desentralisasi dengan segala bentuknya telah memberikan ruang bagi pemberdayaan energi sosial yaitu kepedulian sesama warga masyarakat terhadap kepentingan satu sama lain yang saling sinergis. Mereka sadar benar bahwa kesadaran sosial, ketahanan sosial itu penting dan perlu dikembangkan untuk menghadapi kerasnya kehidupan di lingkungan sosial dan fisik. Lembaga-lembaga sosial dalam bentuk “sambatan” (Jawa Tengah), “gaga-gili” (Flores), tetap ada walaupun menghadapi segala perubahan jaman, karena pada dasarnya lembaga tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Lembaga lokal tersebut dalam kehidupan masyarakat memiliki 4 prinsip hubungan yang mengikat orang-orang sedemikian rupa sehingga mereka menjadi kelompok sinergis yaitu prinsip hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan, hubungan tempat tinggal, hubungan yang tidak datang dari masyarakat itu sendiri misal adanya RT, RW dan prinsip hubungan karena adanya tujuan khusus misalnya ibadah, dan ekonomi.

Konsep pemberdayaan tampil dalam kecenderungan yang mengarah pada apa yang lebih dikenal dengan sebutan konsumerisme. Bentuk-bentuk pemberdayaan ini memiliki rentang mulai dari pendekatan kosmetik simpati yang dilakukan dengan cara menyediakan informasi kepada para konsumen atau menyediakan kotak saran hingga partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tersirat makna adanya berbagi kekuasaan. Pemberdayaan dalam bentuk konkritnya berupa partisipasi. Partisipasi yang dimaksud bukan sekedar bersifat formalitas, bukan pula berarti membuat pertemuan besar, dengan cara seluruh stakeholders diundang.

Pendidikan merupakan upaya secara terencana untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya, kurikulumnya harus dikembangkan melalui prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Dari sisi pendanaan, pendidikan juga menjadi tanggungjawab masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Yang dapat diperankan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan penggunaan hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan sekolah dan komite sekolah.

Dalam konteks ini yang dimaksud masyarakat adalah komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat (agama, seni, dan budaya), pemerintah daerah, pemerintah desa, pengusaha, petani, perajin.

Lembaga pendidikan formal dalam menyelenggarakan pendidikannya harus melakukan pemberdayaan masyarakat baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Karenanya, sekolah melalui kepala sekolah harus dapat memberdayakan masyarakat, agar disamping masyarakat diberdayakan, sekolah juga memperoleh manfaat untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan melalui kepedulian mereka.

Beberapa hasil penelitian (Arianti, 2005, Nevitriana Anggraeni, 2004) menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, mengambil manfaat dan evaluasi dalam kategori rendah. Sementara itu, secara yuridis setiap sekolah harus menyelenggarakan pendidikan dengan model manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yang pada intinya penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan masyarakat melalui otonomi pendidikan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kondisi masyarakat berpengaruh dalam pemberdayaan. Namun demikian kelompok pemberdaya juga dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan, program merupakan manifestasi sebuah kebijakan. Sementara kebijakan merupakan produk dari sebuah tarik menarik kepentingan dari para stakeholders, dengan demikian program yang telah disusun oleh sekolah (kepala sekolah) merupakan manifestasi dari kepentingan para stakeholders. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kepala sekolah.

Pemberdayaan

Selama ini paradigma pembangunan didominasi oleh kapitalisme dan sosialisme. Sintesa dari kedua paham tersebut dapat berbentuk: *welfare state*, *growth* dan *humanizing*. Pendekatan tersebut mengalami pemitosan dan akhirnya terjadinya demistifikasi. *People centered development* memuat doktrin kapitalisme, dengan paradigma *best government is less intervention*, *free market economy and capital oriented*. *People centered* termasuk paradigma *humanizing*, yang berasal dari pensintesisan paradigma *welfare* (kesejahteraan) yang menjadikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Komitmennya adalah melaksanakan program sesingkat mungkin, serta jalur selangsiung mungkin, terutama dengan meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Pendekatannya adalah memberi pendisainan program yang memberi paket teknologi, sarana produksi, dana, logistik, subsidi yang mendorong masyarakat tumbuh dan sejahtera, tetapi cenderung dipandang sebagai obyek amaliah (Korten, 1992). Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis antara *growth* (pertumbuhan), dengan *people centered*. Konsep ini lebih luwes, tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari satu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung (partisipasi) demokrasi dan pembelajaran masyarakat melalui pengalaman langsung, sebagai titik fokus pemberdayaan adalah lokalitas. Menurut Friedman (1992) hal ini disebabkan karena *civil society* merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Ia mengingatkan bahwa sangat tidak realistis jika kekuatan ekonomi dan stuktur di luar *civil society* diabaikan. Oleh karenanya menurut Friedman pemberdayaan tidak hanya sebatas ekonomi saja namun secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar menawar (*bargaining power*) baik secara nasional maupun internasional. Ini sebenarnya sudah sangat erat hubungannya dengan pendapat Freire, sebagaimana dikatakan oleh Escobar ((1998) bahwa sistem pendidikan yang tidak memberdayakan, dampaknya akan menjadikan produk pendidikan sebagai penguasa-penguasa baru yang akan memperdaya bukan memberdayakan masyarakat.

Otonomi Pendidikan

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. UU dan PP tersebut menuntut sistem pemerintahan Indonesia yang di masa depan akan menjadi otonom. Berdasarkan pasal 11 UU No. 22 Tahun 2000 bahwa pendidikan dan kebudayaan telah ditetapkan

sebagai salah satu bidang pemerintahan yang diotonomkan di daerah kabupaten, daerah kota dan atau daerah propinsi, walaupun untuk perguruan tinggi masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Sistem ini akan memunculkan berlangsungnya sistem desentralisasi pendidikan yaitu sistem dimana pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan tak lagi terpusat di Jakarta tetapi “merata” ke daerah-daerah PP No. 25 tersebut secara eksplisit telah merumuskan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk mengambil keputusan dan kebijakan pemerintahan pada banyak bidang sekaligus, termasuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Atas dasar ketentuan ini maka sistem desentralisasi pendidikan harus dijalankan.

Pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dengan menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Selanjutnya pada Undang-undang tersebut pasal 52 dijelaskan setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kurikulum, kalender akademik, struktur organisasi, pembagian tugas, peraturan akademik, tata tertib, dan kode etik antara sesama warga di lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat dan biaya operasional satuan pendidikan. Dalam konteks ini yang dimaksud masyarakat adalah komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat (agama, seni, dan budaya), pemerintah daerah, pemerintah desa, pengusaha, petani, perajin.

Menurut Depdikbud (2003) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait (stakeholders) dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Dengan kata lain esensi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah Otonomi juga dapat dimaknai sebagai kewenangan atau kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, sedangkan pengambilan keputusan partisipatif merupakan cara pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis terhadap masyarakat (warga sekolah dan tokoh masyarakat). Oleh karena sekolah memiliki otonomi maka ia dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dengan demikian sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan atau menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi segala program. Konsep ini menuntut sekolah memiliki visi ke depan. Untuk keperluan tersebut seluruh komponen sekolah mesti memahami potensi diri dan kekurangannya sehingga dapat menentukan

perencanaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut maka sekolah dituntut untuk memberdayakan masyarakat.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan.

Paradigmanya adalah:

1. Pembangunan pendidikan di daerah akan sangat menjadi sangat strategis dalam membangun SDM di daerah, dan
2. Kebijakan daerah atas pembangunan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan akses dan kontrol terhadap sumber pembangunan bagi daerah sehingga pembangunan dapat berguna di daerah;
3. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam konteks otonomi pendidikan menurut Depdikbud (2003) adalah Komite Sekolah yang anggotanya terdiri dari orangtua siswa, wakil dari siswa, wakil dari sekolah, wakil dari organisasi profesi, wakil dari pemerintah dan wakil dari publik.

Dengan demikian yang dimaksud masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah:

1. Semua komponen yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai tatausaha dan siswa.
2. Perguruan tinggi yang memiliki akses rasional dan obyektif dalam hal pendidikan, penelitian dan penganbdian pada masyarakat di samping itu juga memiliki akses materi yang memadai.
3. Tokoh-tokoh masyarakat (agama, budaya dan budaya dll)
4. Para usahawan dan para profesional
5. Lembaga pendidikan lain di luar sistem sekolah yangbersangkutan
6. Pemerintah (pemda, kepolisian, militer).

Metode Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam judul, bahwa fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program di SMA. Sekolah sebagai agen pembaharuan, karenanya melalui kepala sekolah pemberdayaan masyarakat dapat diwujutkan. Sehubungan dengan hal tersebut populasinya adalah SMA di kabupaten Sleman.Responden dalam penelitian ini adalah semua kepala SMA di kabupaten tersebut..

Metode pengumpulan data yang dipakai dengan menggunakan angket. Teknik pengumpulan data dengan angket dan didukung dengan wawancara.

Instrumen untuk menjaring data berupa angket dan pedoman wawancara. Angket yang digunakan model angket tertutup, di mana responden tinggal memberikan tanda V (Centang) tentang pernyataan-pernyataan pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan keadaan responden yang sebenarnya. Metode wawancara digunakan untuk mengungkap proses penyusunan program sebagai validasi data yang diperoleh melalui angket tertutup.

Analisis data digunakan presentase. Pemberdayaan masyarakat dibedakan ke dalam 6 tingkatan, yaitu:

- a. Sekor 0, (tidak ada pemberdayaan) jika kepala sekolah membawa program dengan tanpa melibatkan masyarakat sedikitpun
- b. Sekor 1, rendah sekali, jika masyarakat hanya diberitahu dan diharapkan dapat menerima
- c. Sekor 2, rendah, jika program dipromosikan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- d. Sekor 3 moderat, jika sekolah memberikan kesempatan agar masyarakat memberikan masukan dan kritik terhadap program yang telah disusun
- e. Sekor 4, tinggi, jika program sekolah dimungkinkan disusun bersama antara sekolah dengan masyarakat.
- f. Sekor 5, sangat tinggi, jika masyarakat diberikan delegasi dalam penyusunan program sekolah
- g. Sekor 6, sempurna, jika masyarakat dilibatkan dalam pengendalian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil tabulasi data tersebut dilakukan analisis data. Untuk rumusan masalah pertama sampai keenam dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik persentase. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dengan persentase relatif. Penghitungan presentase relatif ini dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh pada setiap tingkatan pemberdayaan dan setiap pemangku kepentingan (komite sekolah, tokoh agama, seniman dan budayawan, pengusaha, pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan) sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis data pada rumusan masalah yang ke-tujuh juga dilakukan dengan menggunakan teknik persentase, sedangkan pemaknaannya dilakukan secara kualitatif berdasarkan dukungan data hasil wawancara.

1. Pemberdayaan Komite Sekolah di SMA kabupaten Sleman.

Secara umum tingkat pemberdayaan komite sekolah di SMA pada tingkatan tidak ada (tidak ada pemberdayaan) sebesar 0,4%, sangat rendah 2%, rendah 62% dan moderat 34 %. Secara rinci, hal ini dapat dideskripsikan sebagaimana diuraikan berikut.

- a. Pemberdayaan komite sekolah pada tingkatan tidak ada pemberdayaan dilakukan oleh 0,4% SMA. Artinya ada 0,4% SMA yang tidak memberdayakan komite sekolah, dan itupun dilakukan oleh SMA swasta.
 - a. Pemberdayaan komite sekolah pada tingkatan sangat rendah dilakukan oleh 2,6% SMA, yang terdiri 1% SMA negeri dan 1,6% SMA swasta.
 - b. Pemberdayaan komite sekolah pada tingkatan rendah dilakukan oleh 62% SMA, yang terdiri 17% SMA negeri dan 45% SMA swasta.
 - c. Pemberdayaan komite sekolah pada tingkatan moderat dilakukan oleh 35% SMA, yang terdiri 16% SMA negeri dan 19% SMA swasta.

Hasil penelitian ini juga memberikan indikasi bahwa komite sekolah yang salah satu fungsinya memberikan arahan, belum diberdayakan. Hal ini dapat dibuktikan, ternyata baru ada 6 SMA atau 12% dari 48 sekolah yang memberdayakan komite sekolah dalam penentuan visi dan misi sekolah, dan itupun masih pada tingkatan "sangat rendah", "rendah" dan "moderat".

2. Pemberdayaan pengusaha/dunia usaha dalam penyusunan program di SMA kabupaten Sleman

Secara umum tingkat pemberdayaan pengusaha/dunia usaha di SMA pada tingkatan rendah 92%, dan moderat 8%. Secara rinci hal ini dapat dideskripsikan sebagaimana diuraikan berikut.

- a. Pemberdayaan pengusaha/dunia usaha pada tingkatan rendah, dilakukan oleh 92% SMA, yang terdiri 42% SMA negeri dan 50% SMA swasta.
- b. Pemberdayaan pengusaha/dunia usaha pada tingkatan moderat, dilakukan oleh 8% SMA, yang terdiri 4% SMA negeri dan 4% SMA swasta.

Secara akademik rendahnya pemberdayaan sekolah terhadap pengusaha disebabkan oleh kurangnya kaitan antara kegiatan akademik sekolah (SMA) dengan kegiatan operasional dunia usaha. Dengan kata lain, kegiatan dunia usaha tidak memerlukan keterkaitan dengan kegiatan sekolah. Implikasinya kegiatan dunia usaha tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh sekolah, sebaliknya sekolah juga tidak dipengaruhi oleh dunia usaha, tetapi justru oleh pemerintah daerah. Sebagai pemangku kepentingan ternyata pengusaha merasa tidak membutuhkan sekolah. Pada hal hasil penelitian menunjukkan bahwa para lulusan sekolah umum lebih fleksibel dalam mobilitasnya. Artinya seorang lulusan sekolah umum memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang daripada sekolah kejuruan, karena mereka dikondisikan memiliki kemampuan dasar yang dapat dikembangkan ke arah kemampuan teknis yang lebih tinggi daripada sekolah kejuruan. Sekalipun pada tataran teknis sekolah umum (SMA) tidak memerlukan dunia usaha,

tetapi pada pengembangan sumberdaya manusia di dunia usaha, sekolah umum lebih diperlukan untuk jangka panjang, sehingga pemberdayaan dunia usaha tetap diperlukan.

3. Pemberdayaan tokoh agama dalam penyusunan program di SMA kabupaten Sleman

Tingkat pemberdayaan tokoh agama di SMA kabupaten Sleman dalam tingkatan rendah sebesar 21%, moderat 52%, dan tinggi 27%. Pemberdayaan tokoh agama oleh SMA sangat variatif, mulai dari rendah, moderat dan tinggi. Artinya sekolah secara bersama-sama mengajak tokoh agama menyusun program. Fakta ini kemungkinan didukung oleh kondisi sosial budaya. Artinya tokoh agama dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pencerah kehidupan. Keyakinan ini juga didukung oleh banyaknya persoalan yang merupakan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat dengan mudah dikendalikan melalui pendekatan agama. Apalagi masyarakat memiliki keyakinan yang mendalam tentang kehidupan sekarang dan masa mendatang. Pada perspektif lain, banyaknya sekolah swasta yang berafiliasi pada agama jelas memberikan porsi tersendiri bagi pemberdayaan tokoh agama.

4. Pemberdayaan seniman dan budayawan dalam penyusunan program di SMA kabupaten Sleman

Secara umum tingkat pemberdayaan pengusaha/dunia usaha di SMA pada tingkatan rendah sebesar 77%, dan moderat 25%. Secara rinci hal ini dapat dideskripsikan sebagaimana diuraikan berikut.

- a. Pemberdayaan seniman dan budayawan pada tingkatan rendah dilakukan oleh 77% SMA, yang terdiri 54% SMA negeri dan 23% SMA swasta.
- b. Pemberdayaan seniman dan budayawan pada tingkatan moderat dilakukan oleh 23% SMA, yang terdiri 8% SMA negeri dan 15% SMA swasta.

Atas dasar data tersebut, jelaslah bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh SMA pada tingkatan rendah dan moderat. Para seniman dan budayawan memberikan masukan dan kritik terhadap program yang disusun sekolah. Kondisi ini dilakukan oleh sebagian SMA negeri. Rendahnya tingkat pemberdayaan seniman dan budayawan oleh sekolah disebabkan perubahan sosial. Pada sisi lain, fakta menunjukkan bahwa kabupaten Sleman memiliki potensi yang aktual dan manifes. Pada sisi aktual, kabupaten memiliki berbagai tempat yang merupakan pusat pendidikan seni, misalnya UGM, UNY, dan Ramayana. Potensi yang manifes nampak dari

banyaknya kesenian yang ada di kabupaten Sleman. Karena itu, sebenarnya jika pemerintah daerah ingin memiliki keunggulan kompetitif yang berlevel internasional, nampaknya bidang seni harus dibangun. Melalui seni maka Sleman akan “go international”, dan potensi untuk itu tersedia. Seniman dan budayawan Sleman memiliki sikap gotong royong yang tinggi, solidaritas, motivasi untuk mengembangkan seni juga tinggi, serta diikuti oleh loyalitas seniman dan budayawan terhadap seni, karenanya pembinaan potensi seni merupakan keniscayaan.

5. Pemberdayaan pemerintah daerah dalam penyusunan program di SMA kabupaten Sleman

Secara umum tingkat pemberdayaan pemerintah daerah di SMA pada tingkatan sangat rendah 16,9%, rendah 50%, moderat 32% dan tinggi 1,1%. Pemberdayaan pemerintah daerah pada tingkatan sangat rendah, dilakukan oleh 16,9% SMA, yang terdiri 2,9% SMA negeri dan 14% SMA swasta.

Atas dasar hasil penelitian tingkatan tersebut berarti baru sedikit SMA yang memberikan kesempatan untuk melakukan penyusunan program secara bersama (tingkatan tinggi) antara sekolah dengan pemerintah daerah, sebagian besar sekolah memberdayakan pemerintah daerah pada tingkatan “menunjukkan program yang telah disusun kemudian dimintakan persetujuan dan memberikan peluang untuk memberikan masukan dan kritik”. Ini berarti budaya minta petunjuk masih berlaku, dan menurut teori birokrasi atasan tetap mengharapkan dapat mengendalikan bawahan.

Atas dasar data tersebut diketahui bahwa pemerintah kecamatan dalam penyusunan program pada posisi dimintai dukungan dan memberikan masukan dan kritik terhadap program yang sudah disusun oleh sekolah. Artinya keputusan yang diambil dengan prinsip kesetaraan belum dilakukan. Apa yang disebut keputusan bersama dimaknai sebagai disetujui bersama, padahal hakikat keputusan bersama tersebut adalah proses awal sampai terumuskannya suatu keputusan harus dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat, bukannya keputusan yang telah diambil oleh sekolah kemudian dipaparkan dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Tingkatan pemberdayaan yang rendah dan moderat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk terlibat sampai pada masalah teknik. Hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki garis komando, artinya secara struktural pemerintah hanya memiliki garis koordinatif, sehingga tidak memiliki konsekuensi birokratis bagi SMA. Kedua, kepala sekolah memiliki kepangkatan yang lebih tinggi daripada pejabat tingkat kecamatan, sehingga fakta ini secara sosio psikologis mengganggu hubungan

keduanya. Ketiga, kepala sekolah secara struktural bukannya bawahan atau subordinasi pemerintah kecamatan.

Mencermati hasil penelitian dan analisis data sebagaimana telah dikemukakan, ternyata hanya ada 8 SMA (16%) dari 48 SMA yang memberdayakan komite sekolah dan pemerintah daerah dalam penyusunan visi dan misi, sedangkan pemangku kepentingan lainnya tidak diberdayakan oleh 32 SMA (84%). Kondisi tersebut sebenarnya tidak mendukung adanya kemauan politik pemerintah dalam pendidikan.

Secara teoritik, telaah hubungan antara sistem pendidikan dengan masyarakat dapat dilihat dari model klasik. Model ini memiliki kerangka pikir bahwa lembaga pendidikan dapat mengubah pribadi-pribadi lulusan. Para lulusan kemudian memasuki dunia sosial ekonomi, dan selanjutnya lembaga ini berkembang, dan membutuhkan tenaga melalui pendidikan. Atas dasar kerangka pikir inilah Inkeles, serta Almond dan Verba dalam penelitiannya telah menunjukkan bahwa banyaknya pendidikan yang didapat oleh seseorang individu, memiliki relasi yang kuat dalam keterlibatannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Masyarakat memakai mekanisme dan caranya sendiri untuk memilih anggota-anggotanya. Goldstrop (1993) di dalam bukunya Sosiologi Dunia Ketiga dengan tegas mengatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam masyarakat tidak dipengaruhi tingkat pendidikan, tetapi oleh banyaknya pelatihan yang diperoleh.

Hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, sebagian besar sekolah baru memberdayakan masyarakat pada tingkatan mempromosikan program untuk memperoleh dukungan dan pada tingkatan memberikan masukan dan kritik kepada sekolah. Kedua tingkatan pemberdayaan yang dilakukan oleh sekolah ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya, keterbatasan masyarakat dari dimensi ekonomi, pendidikan, budaya dan politik sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan yang dilakukan

Kebudayaan masyarakat dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap setiap pribadi. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa masyarakat pedesaan khususnya memiliki sikap menghindari konflik. Mereka umumnya memiliki budaya "*wong ngalah dhuwur wekasane*", "*ngluruk tanpa bala lan menang tanpa ngasorake*".

Dimensi politik, juga menunjukkan bahwa para pejabat formal lebih menghargai para atasan langsung. Orientasi pada atasan inilah yang nampaknya sulit untuk dihindari. Apalagi setiap orang menghendaki adanya mobilitas sosial. Semakin berambisi untuk melakukan mobilitas sosial, maka semakin rendah dalam memberdayakan komite sekolah, tokoh agama, seniman dan pengusaha.

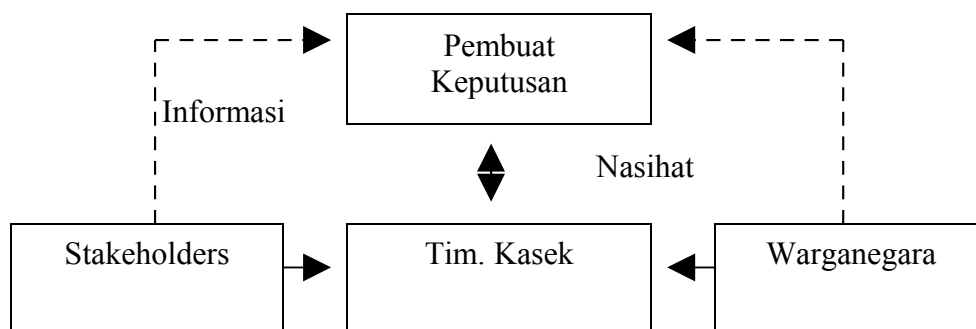
6. Proses penyusunan program yang dilakukan di SMA Kabupaten Sleman

Setelah diketahui tentang tingkat pemberdayaan masyarakat di SMA kabupaten Sleman sebagaimana diuraikan di atas dan dalam hal mana saja pemberdayaan tersebut dilakukan maka berikut ini disajikan data hasil penelitian dan pembahasan tentang pola atau model pemberdayaannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para kepala sekolah terkait dengan penyusunan program kerja di SMA Sleman diperoleh informasi:

- a. Penyusunan program sekolah dilakukan melalui suatu proses. Proses ini melibatkan warga sekolah dan di luar sekolah, baik yang termasuk maupun yang bukan pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu warga sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat memberikan informasi secara informal kepada kepala sekolah terkait dengan penyusunan program kerja yang berisi bidang garapan manajemen pendidikan (ketatalaksanaan, kurikulum, siswa, sumberdana, personil, humas, sarana dan prasarana serta lembaga/organisasi). Masukan kepada kepala sekolah tidak hanya terbatas yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga dilakukan oleh mereka yang tidak termasuk dalam kelompok pemangku kepentingan yaitu masyarakat lingkungannya. Masukan yang diberikan misalnya dalam bentuk informasi secara informal terkait dengan keamanan sekolah, kesehatan lingkungan dan kurikulum muatan lokal. Pola proses penyusunan program sebagaimana diuraikan dapat divisualisasikan dalam model berikut ini.

Diagram 1. Proses Pembuatan Keputusan



Keterangan:

- > : Hubungan langsung
- - -> : Kemungkinan arus informasi

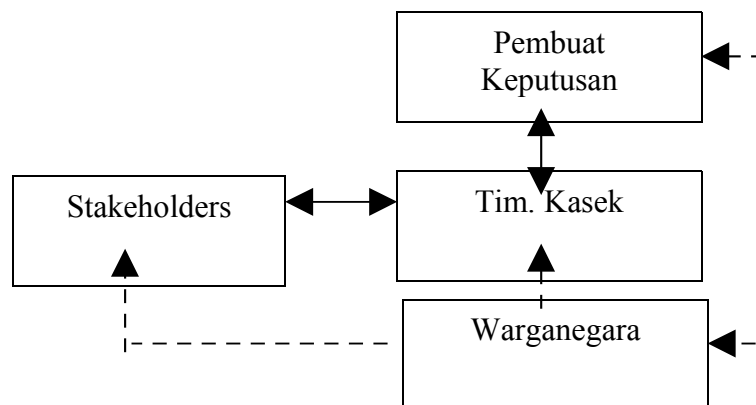
Pola sebagaimana digambarkan tersebut dilakukan oleh 34 SMA kabupaten Sleman, dengan rincian 8 SMA negeri dan 26 SMA swasta. Artinya dari 48 SMA yang ada di kabupaten

Sleman, ternyata 34 SMA (70%) diantaranya melakukan proses penyusunan program dengan menggunakan pola pertama, yaitu proses dialog hanya terjadi antara kepala sekolah dengan tim yang dibentuk oleh kepala sekolah, sedangkan pemberian masukan dari warga negara dan pemangku kepentingan bersifat searah. Secara rinci jumlah tersebut terdiri 16% SMA negeri dan 54% SMA swasta menggunakan pola tersebut. Proses penyusunan program sebagaimana dikemukakan di atas sangat menarik, namun sekali lagi keputusan terakhir ada di tangan kepala sekolah.

Pola proses penyusunan program kerja yang dilakukan di SMA kabupaten Sleman dapat divisualisasikan berikut ini.

Pola kedua:

Diagram 2. Proses Penyusunan Program Kerja



Keterangan:

- ▶ : Hubungan langsung
- - - ▶ : Kemungkinan arus informasi

Pola sebagaimana digambarkan tersebut dilakukan oleh 14 SMA kabupaten Sleman, dengan rincian 9 SMA negeri dan 5 SMA swasta. Artinya dari 48 SMA yang ada di kabupaten Sleman, ternyata 14 SMA (30%) di antaranya melakukan proses penyusunan program dengan menggunakan pola kedua. Intinya penyusunan program dilakukan, melalui proses dialog langsung dilakukan antara pemangku kepentingan dengan tim kepala sekolah, dan dilanjutkan dengan diskusi atau dialog langsung antara tim kepala sekolah dengan kepala sekolah. Namun sebelum dilakukan proses dialog tersebut, kepala sekolah telah memperoleh masukan dari masyarakat secara informal dan dialogis, sementara tim kepala sekolah dan pemangku kepentingan juga memperoleh masukan dari masyarakat secara informal dan satu arah. Pola kedua ini sebenarnya lebih bagus, sayangnya pola ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil sekolah.

Kenyataan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala dan tim kepala sekolah masih menjadi pemegang otoritas dalam penyusunan program. Mereka sebelum memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan telah memiliki konsep tentang berbagai permasalahan yang menjadi bahan dalam penyusunan program.

Mencermati kondisi proses penyusunan program sebagaimana diuraikan di atas, Dryzek, sebagaimana dikutip Solichin (1998), dengan nada keras menyatakan bahwa usaha-usaha analisis kebijakan yang dilakukan selama ini pada umumnya merupakan wujud ilmu kebijakan untuk kepentingan tirani, karena proses kebijakan selalu didominasi dan dikontrol oleh elit yang berkuasa, sehingga praktis melibas kepentingan dan aspirasi masyarakat, bahkan menurut Solichin (1998) para pakar analisis kebijakanpun dengan segala pengetahuan profesionalnya justru telah memainkan peran central sebagai abdi setia dari para elit yang berkuasa, membantu mereka menindas massa rakyat, dan membantu mereka untuk mempertahankan status quo, yang pada banyak kasus, merugikan kepentingan yang lemah. Peran tim kepala sekolah seharusnya memposisikan sebagai sebuah tim yang berfungsi menghimpun informasi, sehingga pengambil kebijakan/keputusan dan menyajikan keputusan yang jauh lebih baik.

Kesimpulan

1. Tingkat pemberdayaan komite sekolah di SMA kabupaten Sleman pada tingkatan "tidak ada" pemberdayaan yaitu sebesar 0,4%. Artinya terdapat 0,4% SMA tidak memberdayakan komite sekolah, sedangkan pada tingkatan sangat rendah, komite sekolah diberdayakan oleh 2% SMA, pada tingkatan rendah pemberdayaan dilakukan oleh 62% SMA dan pada tingkatan moderat terdapat 34 % SMA yang memberdayakan komite sekolah.
2. Tingkat pemberdayaan pengusaha/dunia usaha di SMA kabupaten Sleman pada tingkatan rendah sebesar 92%, dan moderat 8%. Artinya pada tingkatan rendah, para pengusaha/dunia usaha diberdayakan oleh 92% sekolah, pada tingkatan moderat diberdayakan oleh 8% sekolah.
3. Tingkat pemberdayaan tokoh agama di SMA kabupaten Sleman dalam tingkatan rendah sebesar 21%, moderat 52%, dan tinggi 27%. Artinya, pada tingkatan rendah, tokoh agama diberdayakan oleh 21% SMA. Pada tingkatan moderat tokoh agama diberdayakan oleh 52% SMA, dan pada tingkatan tinggi diberdayakan oleh 27% SMA.
4. Tingkat pemberdayaan seniman dan budayawan di SMA kabupaten Sleman dalam tingkatan rendah sebesar 77%, dan moderat 23%. Artinya, pada tingkatan rendah, mereka

diberdayakan oleh 77% SMA, sedangkan pada tingkatan moderat mereka diberdayakan oleh 23% SMA.

5. Tingkat pemberdayaan pemerintah daerah di SMA pada tingkatan "sangat rendah" 16,9%, "rendah" 50%, "moderat" 32% dan "tinggi" 1,1%. Artinya, pada tingkatan sangat rendah, pemerintah daerah diberdayakan oleh 16,9% SMA, sedangkan pada tingkatan rendah 50% SMA, tingkatan moderat 32% SMA dan pada tingkatan tinggi 1,1% SMA.

6. Tingkat pemberdayaan pemerintah kecamatan di SMA pada tingkatan rendah sebesar 94%, dan moderat sebesar 6%. Artinya, pada tingkatan rendah pemerintah kecamatan diberdayakan oleh 94% SMA dan pada tingkatan moderat mereka diberdayakan oleh 6% SMA.

7. Proses pemberdayaan masyarakat di SMA kabupaten Sleman dilakukan dengan pola, yaitu:

a. pola pertama, kepala sekolah membentuk sebuah tim penyusun program. Tim ini bertugas mengumpulkan dan menerima masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Masukan itu didiskusikan dengan kepala sekolah. Namun pemangku kepentingan dan masyarakat juga memberikan masukan secara informal kepada pembuat keputusan.

b. Pola kedua adalah kepala sekolah membentuk sebuah tim penyusun program. Setelah tim ini memperoleh masukan secara informal dari masyarakat umum kemudian melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan yang juga telah memperoleh masukan secara informal dari masyarakat umum. Hasil kesepakatan kedua belah pihak melalui dialog tersebut kemudian oleh tim didiskusikan dengan pembuat keputusan yang juga sudah memperoleh masukan secara informal dan dialogis dari masyarakat. Melalui forum ini program diputuskan berdasarkan skala prioritas.

8) Temuan penelitian ini adalah:

a) Dalam penyusunan visi dan misi ternyata baru ada 12% sekolah yang memberdayakan pemerintah daerah dan hanya dilakukan oleh SMA Negeri sedangkan pemangku kepentingan yang lain (pengusaha, tokoh agama, seniman budayawan, komite sekolah, pemerintahan kecamatan) tidak diberdayakan;

b) Proses penyusunan program belum menunjukkan adanya kesetaraan dan kebersamaan;

c) Secara umum, komite sekolah sebagai representasi masyarakat belum diberdayakan secara optimal;

d) Tingkat pemberdayaan "rendah dan moderat" sebagaimana dilakukan oleh sekolah dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

A. Saran

1. Komite Sekolah sebagai lembaga yang secara formal harus diberdayakan dalam penyusunan visi dan misi sekolah, agar lembaga ini ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Sebaiknya tim kepala sekolah juga ada yang berasal dari luar sekolah, sehingga masukan yang diperoleh dapat diartikulasikan untuk dapat disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Nevitriana, (2004). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Paket C di PKBM Langen Widyatama Kecamatan Kraton, Skripsi, FIP UNY*
- Arianti, (2005) *Upaya sekolah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada sekolah swasta se kecamatan Piyungan, Skripsi, FIP UNY*
- Depdiknas, (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah, Buku 1, Jakarta, Depdiknas*
- Escobar, Miguel dkk (ed). (1998). *Sekolah Kapitalisme yg Licik Yogyakarta, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Jakarta, LkiS.*
- Kepmendkinas, Nomor: 044/U/2002, tentang *Dewan Sekolah dan Komite Sekolah.*
- Korten, David, (1990). *Getting to the 21 st Century*, West Hardford, Counn Kumarian
- Mahardika, Timur, (2001). *Pendidikan Politik: Pemberdayaan Desa: Sebuah Panduan*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, (2006). *Tentang Standar Nasional pendidikan*, Bandung PT Citra Umbara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 *tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi*, Yogyakarta, JJ. Learning
- Rondinelli, Denis A, (1981). *Governmental Decentralization in comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Adminitrative Sciences*
- Soemardjan, Selo, (1997). *Kemiskinan Suatu Pandangan Sosiologi, Jurnal Sosiologi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ikatan Sosiologi Indonesia
- Tim Crescent, (2003). *Menuju Masyarakat Mandiri, Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *tentang Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, JJ. Learning

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, JJ. Learning

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (2006). *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung, PT Citra Umbara

Wahab, Abdul & Solichin, (1998). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*, Edisi 1, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw Malang

Wardhono, Hendro, (1998). *Dimensi-Dimensi "People Oriented" dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal (PSDL)*, Malang, Unibraw

Zauhar, Susila, (1994). *Kebijakan Pemantapan Desentralisasi menuju Pembangunan KTI (Kawasan Indonesia Timur) yang lebih Mandiri dan Merata*, Majalah Science Nomor: 23, Juni 1994